

## BAB II

### PSAK NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PSAK NO. 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

#### 2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.<sup>20</sup>

Munawir mengemukakan bahwa pada dasarnya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Harahap, laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 38

<sup>21</sup> Gibran Ramadhan, *Pengertian Laporan Keuangan dan Menurut Para Ahli*, 2013, <http://gibran-deleonardo.blogspot.com/2013/04/pengertian-laporan-keuangan.html?m=1>.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Istilah laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.<sup>23</sup>

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;

---

<sup>23</sup> IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi*, 1994, hlm. 2

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan.

---

<sup>24</sup> DSAK IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, IAI, Jakarta, 2007, paragraph 32.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan.

### **1. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.<sup>25</sup>

### **2. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan**

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK, *Peraturan Nomor VIII.G.7* menjelaskan bahwa peraturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan memberikan pedoman mengenai struktur, isi, persyaratan dalam penyajian dan

---

<sup>25</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 126

pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat umum maupun untuk disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Secara umum, laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. Arus kas

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk menyatakan pos keuangan baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang.

## **2.2 Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 1 dan PSAK No. 101**

### **2.2.1 Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 1**

Laporan keuangan yang lengkap di dalam PSAK No.1 terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode);
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;

- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan dan manajemen entitas bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.<sup>26</sup>

**a. Laporan Posisi Keuangan (neraca pada akhir periode)**

Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode), tambahan neraca ini untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non pengendali (*non controlling interest*). Penyajian kepentingan *non controlling interest* sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan keuangan awal periode (dari periode sajian) untuk penyajian retroaktif. Minimum line item Penyajian Neraca:

1. Properti Investasi
2. Provisi

---

<sup>26</sup> DSAK IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 2013, hlm. 1.2

3. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas
4. Aset yang dimiliki untuk dijual
5. Dll

Tabel 2.1  
Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi PSAK No. 1

ASET	LIABILITAS
Aset lancar	Liabilitas jangka pendek
Aset tidak lancar	Liabilitas Jangka Panjang
	EKUITAS
	Hak Non Pengendali
	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Perbedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek.

Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas Pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan

untuk setiap pos aset dan liabilitas, jika nilainya digabung.<sup>27</sup>

Klasifikasi aset lancar:

1. Mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan; atau
3. Kas atau setara kas (PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas lancar:

1. mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
2. memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
4. tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1.5

Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali.

Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan.

#### **b. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode**

ED PSAK ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua bagian yaitu; Laba Rugi dan Pos Penghasilan Komprehensif Lain. DSAK meyakini hal ini akan memberikan lebih banyak konsistensi dalam penyajian dan membuat pelaporan keuangan menjadi lebih dapat diperbandingkan.<sup>29</sup>

IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 02 tentang ruang lingkup dengan penambahan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 1.11

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 1.6

Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas, ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi ada pengungkapan berdasarkan sifat Penyajian “pos luar biasa/*extraordinary item*” tidak diperkenankan lagi.

Laba komprehensif, yaitu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, yaitu:

1. Selisih revaluasi aset tetap
2. Perubahan nilai investasi available for sales
3. Dampak translasi laporan keuangan

Dalam dua laporan:

1. Laba sebelum laba komprehensif
2. Laporan laba komprehensif dimulai dari laba/rugi bersih

Minimum line item L/R Komprehensif:

1. pendapatan;
2. biaya keuangan;
3. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
4. beban pajak;<sup>30</sup>
5. suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
  - a. laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 1.6

- b. keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;
6. laba rugi;
  7. setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam huruf (h));
  8. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;

Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah:

1. penurunan nilai persediaan /aset tetap dan pemulihannya
2. restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi;
3. pelepasan aset tetap;
4. pelepasan investasi;
5. operasi yang dihentikan;
6. penyelesaian litigasi; dan
7. pembalikan laibilitas diestimasi lain.

Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan.<sup>31</sup>

Pemilihan klasifikasi beban-sifat berdasarkan faktor historis dan industri, klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi.

Pendapatan		XXX
Pendapatan lainnya		XXX
Perubahan atas persediaan		
Barang jadi dan barang dalam proses	XXX	
Bahan baku yang digunakan	XXX	
Beban imbalan kerja	XXX	
Beban penyusutan dan amortisasi	XXX	
Beban lainnya	XXX	
Total beban		(XXX)
Laba sebelum pajak		XXX

Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 1.5

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 1.8

Pendapatan	XXX
Beban penjualan	(XXX)
Laba bruto	XXX
Pendapatan lainnya	XXX
Beban distribusi	(XXX)
Beban administratif	(XXX)
Beban lainnya	(XXX)
Laba sebelum pajak	XXX

### c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas, terdiri dari:

1. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali
2. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif.
3. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik
4. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 1.10

#### **d. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan, meliputi:

1. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi : dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi;
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan;
3. Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan :  
(pengelolaan modal)

Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.<sup>34</sup>

Pengungkapan lain:

1. Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan.
2. Jumlah dividen preferen yang tidak diakui.
3. Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan dibagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama laporan keuangan:
  - a. domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor
  - b. ketenagaan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 1.10

- c. nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha
- d. bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas.<sup>35</sup>

### 2.2.2 Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 101

Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- j. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- k. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- l. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- m. Laporan arus kas selama periode;
- n. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
- o. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode; dan
- p. Catatan atas Laporan Keuangan;
- q. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 38 dan 39; dan
- r. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 1.10

Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan point (e) dan (f).<sup>36</sup>

#### **a. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode**

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan 58. laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) piutang usaha dan piutang lain;
- c) persediaan;
- d) investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- e) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (a), (b) dan (d));
- f) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- g) properti investasi;
- h) aset tetap;
- i) aset takberwujud;
- j) utang usaha dan terutang lain;
- k) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (j) dan (o));

<sup>36</sup> DSAK IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 2014, hlm. 4.5

- l) liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan;
- m) liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46
- n) liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;
- o) provisi;
- p) kepentingan non pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
- q) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.<sup>37</sup>

**b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode**

Laporan laba rugi komprehensif menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- (a) laba rugi;
- (b) total penghasilan komprehensif lain;
- (c) penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Entitas menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan:

- (a) laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4.16

- i. kepentingan non pengendali; dan
  - ii. pemilik entitas induk.
- (b) penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
- i. kepentingan nonpengendali; dan
  - ii. pemilik entitas induk.

Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh sak lain, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- (a) pendapatan usaha;
- (b) bagi hasil untuk pemilik dana;
- (c) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- (d) beban pajak;
- (e) jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan.

Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan sesuai dengan sak:<sup>38</sup>

- a) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 4.24

b) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan.

Disebabkan dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain dari entitas syariah berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas syariah memasukkan pos tambahan dalam laporan laba rugi komprehensif dan mengubah istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan unsur kinerja keuangan. Entitas mempertimbangkan faktor termasuk materialitas, sifat, dan fungsi dari berbagai komponen penghasilan dan beban. Sebagai contoh, suatu institusi keuangan dapat mengubah deskripsi tersebut untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasinya. Entitas syariah tidak diperkenankan melakukan saling hapus penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 31.

Jika terdapat pendapatan non halal, maka pendapatan tersebut tidak disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas syariah maupun

entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan nonhalal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.<sup>39</sup>

Entitas syariah tidak diperkenankan untuk menyajikan pos penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Laba Rugi entitas syariah mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain.

Beberapa SAK menentukan kondisi kapan entitas syariah mengakui pos tertentu di luar laba rugi pada periode berjalan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 07).

#### Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas syariah mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas syariah dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain:

(a) secara neto dari dampak pajak terkait, atau

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 4.25

(b) sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut.

Jika entitas syariah memilih alternatif (b), maka entitas syariah mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.

Entitas syariah mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dengan komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode ketika penyesuaian tersebut direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total penghasilan komprehensif.<sup>40</sup>

Entitas syariah dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 4.26

menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait.

Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16: *Aset Tetap* atau PSAK 19: *Aset Tak berwujud* atau pada pengukuran kembali program imbalan pasti sesuai dengan PSAK 24: *Imbalan Kerja*. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 16 dan PSAK 19).

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.<sup>41</sup>

Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos penghasilan dan beban adalah sebagai berikut:

- a) penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas penurunan tersebut;
- b) restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas biaya restrukturisasi;
- c) pelepasan aset tetap;

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 4.27

- d) pelepasan investasi;
- e) operasi yang dihentikan;
- f) penyelesaian tuntutan hukum; dan
- g) pembalikan provisi lain.

Entitas syariah menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.

Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan analisis di paragraf 104 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban disubklasifikasikan untuk memberikan penekanan pada komponen utama dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian, dan kemampuan untuk dapat diprediksi. Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk.

Bentuk pertama analisis ini adalah metode “sifat beban”. Entitas syariah menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya sebagai contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak merealokasikannya menurut berbagai fungsi dalam entitas syariah. Metode ini mungkin mudah diterapkan karena tidak memerlukan alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 4.27

Pendapatan		XXX
Pendapatan lainnya		XXX
Perubahan atas persediaan		
barang jadi dan barang dalam proses		XXX
Bahan baku yang digunakan		XXX
Beban imbalan kerja		XXX
Beban penyusutan dan amortisasi		XXX
Beban lain		XXX
Total beban		(XXX)
Laba sebelum pajak		XXX

Bentuk kedua analisis ini adalah metode “fungsi beban” atau “biaya penjualan” dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas syariah mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban lain. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 4.28

Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	XXX
Beban penjualan	(XXX)
Laba bruto	XXX
Pendapatan lain	XXX
Beban distribusi	(XXX)
Beban administratif	(XXX)
Beban lain	(XXX)
Laba sebelum pajak	XXX

Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja.<sup>44</sup>

Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban bergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas syariah. Kedua metode tersebut memberikan indikasi tentang biaya yang mungkin dapat bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tingkat penjualan atau produksi. Disebabkan setiap metode penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, Pernyataan ini mensyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Akan tetapi, disebabkan informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan diperlukan ketika metode fungsi

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 4.28

beban digunakan. Dalam paragraf, “imbangan kerja” memiliki pengertian yang sama sebagaimana di PSAK 24: *Imbalan Kerja*.<sup>45</sup>

### c. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode

Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a) total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
  - i. laba rugi;
  - ii. penghasilan komprehensif lain; dan
  - iii. transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 4.29

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 4.29

#### **d. Laporan arus kas selama periode**

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.<sup>47</sup>

#### **e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Selama Periode**

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a) dana zakat berasal dari wajib zakat:
  - (i) dari dalam entitas syariah;
  - (ii) dari pihak luar entitas syariah;
- b) penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) kenaikan atau penurunan dana zakat;
- d) saldo awal dana zakat; dan
- e) saldo akhir dana zakat.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 4.30

dilakukan jika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
- c) kebijakan penyaluran zakat; dan
- d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga.<sup>48</sup>

#### **f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Selama Periode**

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
  - (i) infak;
  - (ii) sedekah;
  - (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 4.30

- (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
  - (v) denda; dan
  - (vi) penerimaan nonhalal.
- b) penggunaan dana kebajikan untuk:
- (i) dana kebajikan produktif;
  - (ii) sumbangan; dan
  - (iii) penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- d) saldo awal dana kebajikan; dan
- e) saldo akhir dana kebajikan

Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.<sup>49</sup>

Entitas syariah pada prinsipnya dilarang memperoleh penerimaan nonhalal. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 4.32

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga; dan
- (d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.<sup>50</sup>

**g. Catatan atas Laporan Keuangan**

- a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi *spesifik* yang digunakan sesuai dengan paragraf 140;
- b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
- c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 4.32

zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, entitas syariah biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

- a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK (lihat paragraf 19);
- b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 124-136;
- c) informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
- d) pengungkapan lain, termasuk:
  - (i) liabilitas kontinjensi (lihat PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
  - (ii) pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lihat PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan).<sup>51</sup>

Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

- a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 4.33

b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Hal yang penting bagi entitas syariah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan sebagai contoh, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar, atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan. Jika entitas syariah menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, sebagai contoh ketika suatu kelompok aset direvaluasi, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi untuk setiap kelompok aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer dimana setiap dasar pengukuran diterapkan.<sup>52</sup>

Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang tercermin dalam kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya atas properti investasi (lihat PSAK 13: Properti Investasi). Beberapa SAK secara spesifik mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu,

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 4.34

termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Sebagai contoh, PSAK 16: Aset Tetap mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan dalam mengelompokkan aset tetap.<sup>53</sup>

### 2.3 Perbedaan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Secara umum perbedaan antara PSAK 1 (2013): *Penyajian Laporan Keuangan* dengan PSAK 101 (2014): *Penyajian Laporan Keuangan* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 dan PSAK 101

Perihal	PSAK 1 (2013)	PSAK 101 (2014)
Penyajian Laporan Keuangan	Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian, tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: <i>Penyajian Laporan Keuangan Syariah</i> .	Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 4.34

<p>Komponen Laporan Keuangan</p>	<p>Komponen Laporan Keuangan Lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan posisi keuangan</li> <li>2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas</li> <li>4. Laporan arus kas</li> <li>5. Catatan atas laporan keuangan</li> <li>6. Informasi komparatif</li> </ol>	<p>Komponen Laporan Keuangan Lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan posisi keuangan</li> <li>2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas</li> <li>4. Laporan arus kas</li> <li>5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat</li> <li>6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan</li> <li>7. Catatan atas laporan keuangan</li> <li>8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya</li> <li>9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif</li> </ol>
----------------------------------	--	---

Komponen laporan keuangan yang ada pada PSAK No. 1 (revisi 2013) dan PSAK No. 101 (revisi 2014), tidak berbeda jauh. Yang menjadi perbedaan adalah di dalam PSAK No. 101 terdapat komponen laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang tidak terdapat pada PSAK No. 1 (revisi 2013).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Di dalam skripsi ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memperlihatkan hasil, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Achmad Ramdhani. <i>Analisis Penerapan PSAK No.46 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Mitra Tritunggal Abadi</i>	Analisis perbandingan akuntansi pajak penghasilan menurut perusahaan dengan akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK No.46 menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi pajak penghasilan belum sesuai dengan PSAK No.46, dimana dalam pelaksanaan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan pemisahan kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan. <sup>54</sup>	Persamaan: Analisis PSAK terhadap penyajian laporan keuangan  Perbedaan: Menganalisis PSAK No. 46 pada PT. Mitra Tritunggal Abadi
2	Ade Kurniawan. <i>Analisis Perbandingan Penerapan SAK</i>	tidak ada perbedaan antara SAK ETAP secara keseluruhan dan PSAK No. 101 di KSU BMT Mujahidin. Perbedaannya terletak	Persamaan: Analisis Perbandingan PSAK  Perbedaan:

<sup>54</sup> Achmad Ramdhani. *Analisis Penerapan PSAK No.46 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Mitra Tritunggal Abadi*, 2015, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1257>

<p><i>ETAP dan PSAK No. 101 Pada KSU Baitul Maal Wat Tamwil Mujahidin Kalimantan Barat</i></p>	<p>dalam hal berbeda yang digunakan dalam laporan laba rugi berbeda terutama pada beban, catatan atas laporan keuangan pernyataan yang tidak terpenuhi oleh SAK ETAP, yaitu tidak ada manajemen dalam laporan keuangan konsolidasi KSU BMT Mujahidin pada tahun 2011 pada penyajian kembali Laporan keuangan KSU BMT Mujahidin pada tahun 2010 berdasarkan SAK ETAP.<sup>55</sup></p>	<p>Perbandingan SAK ETAP dan PSAK No. 101 pada KSU BMWT Mujahidin Kalimantan Barat</p>
--	---	--

<sup>55</sup> Ade Kurniawan. *Analisis Perbandingan Penerapan SAK ETAP dan PSAK No. 101 Pada KSU Baitul Maal Wat Tamwil Mujahidin Kalimantan Barat*, 2013, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/1243>